



Identifikasi Potensi Pemberdayaan Masyarakat Lokal Berdasarkan Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata Dalam Mendukung Pengembangan Daya Tarik Wisata Buntu Burake Kabupaten Tana Toraja

Ellyn Patadungan^{1*}, Marniati², Winta Panimba³, Srisetyawanie Bandaso⁴,
Theo Rio Madika⁵

¹⁻⁵Universitas Kristen Indonesia Toraja

Penulis korespondensi: ellynpatadungan3485@gmail.com

Abstract. *This study aims to identify the potential for local community empowerment based on the implementation of programs carried out by the Tourism Office in supporting the development of the Buntu Burake tourist attraction in Tana Toraja Regency. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving officials of the Tana Toraja Tourism Office, the Buntu Burake Village Head, local community members, micro, small, and medium enterprise (MSME) actors, and sanitation officers around the tourist attraction. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Tourism Office's programs have contributed to the emergence of various community empowerment potentials, including improved human resource capacity through tourism training, the development of local MSMEs, the strengthening of creative economy activities, and increased community participation in supporting tourism activities. The community also possesses considerable potential to develop local products and tourism services that can enhance the attractiveness of the Buntu Burake destination. Nevertheless, several challenges remain, including uneven community participation, limited financial support, and the need for continuous mentoring to optimize community empowerment. These findings suggest that identifying local community empowerment potential can serve as a basis for formulating more effective and sustainable tourism development policies that strengthen community participation in destination management.*

Keywords: Buntu Burake; Community Empowerment; Local Community; Tourism Attraction; Tourism Program.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pemberdayaan masyarakat lokal berdasarkan pelaksanaan program Dinas Pariwisata dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake Kabupaten Tana Toraja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, Kepala Bidang terkait, Lurah Buntu Burake, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petugas kebersihan, serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Pariwisata telah mendorong munculnya berbagai potensi pemberdayaan masyarakat lokal, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kepariwisataan, berkembangnya usaha mikro dan ekonomi kreatif, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung aktivitas pariwisata di kawasan Buntu Burake. Masyarakat juga memiliki potensi dalam mengembangkan produk lokal dan layanan wisata yang dapat memperkuat daya tarik destinasi. Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan dukungan anggaran, dan perlunya pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, identifikasi potensi pemberdayaan masyarakat lokal dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program pengembangan pariwisata yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Buntu Burake; Daya Tarik Wisata; Masyarakat Lokal; Pemberdayaan Masyarakat; Program Pariwisata.

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan potensi lokal. Selain memberikan manfaat ekonomi, sektor pariwisata juga berperan dalam pelestarian budaya, lingkungan, dan identitas suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata (Sihombing & Siahaan, 2018).

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi dalam aktivitas kepariwisataan, tetapi juga melalui pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Menurut Handini et al. (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang mendukung pengembangan destinasi wisata. Dinas Pariwisata sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan usaha mikro, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari berkembangnya sektor pariwisata (Lumbantobing & Sihombing, 2022).

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan budaya, tradisi, serta panorama alam yang menjadi daya tarik wisata. Salah satu destinasi wisata yang berkembang pesat adalah Objek Wisata Buntu Burake, yang dikenal sebagai kawasan wisata religi dengan ikon Patung Yesus Memberkati, didukung oleh panorama pegunungan, jembatan kaca, serta berbagai atraksi wisata lainnya. Keberadaan destinasi ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata.

Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan wisata tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, antara lain pelatihan kepariwisataan, pengembangan usaha mikro, pelatihan kuliner, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, pemasaran digital, serta kegiatan pendampingan kepada masyarakat sekitar kawasan wisata. Program-program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas kepariwisataan (Sinaga et al., 2021).

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan temuan penelitian, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi potensi masyarakat lokal. Sebagian masyarakat telah memanfaatkan peluang melalui pengembangan usaha kuliner, perdagangan, dan jasa wisata, namun masih terdapat potensi lain yang belum berkembang secara maksimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan juga belum merata, sehingga manfaat program belum dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat di sekitar kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan program tersebut dalam mendorong berkembangnya potensi masyarakat lokal.

Potensi masyarakat lokal merupakan modal penting dalam pengembangan daya tarik wisata. Potensi tersebut tidak hanya berupa sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi juga mencakup potensi usaha mikro, ekonomi kreatif, budaya lokal, partisipasi masyarakat, serta kelembagaan yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Apabila potensi-potensi tersebut dapat diidentifikasi dan dikembangkan secara optimal, maka masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata berbasis masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan atau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata (Ahmad et al., 2021; Andaryani & Ambarwati, 2022; Sinaga et al., 2021). Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengidentifikasi potensi pemberdayaan masyarakat lokal berdasarkan pelaksanaan program pemerintah dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata masih relatif terbatas, khususnya pada kawasan wisata Buntu Burake Kabupaten Tana Toraja. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengidentifikasi

berbagai potensi pemberdayaan masyarakat yang muncul dan dapat dikembangkan berdasarkan pelaksanaan program Dinas Pariwisata.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, mengambil keputusan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Menurut Handini et al. (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemandirian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata.

Suharto (2005) dalam Ahmad et al. (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan, memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan pembangunan, termasuk pada sektor pariwisata.

Dalam pengembangan destinasi wisata, masyarakat lokal memiliki peran penting karena mereka merupakan pihak yang paling memahami karakteristik sosial, budaya, dan potensi daerahnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi lokal, pelestarian budaya, serta penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.

Program Dinas Pariwisata dan Potensi Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pariwisata sebagai perangkat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pengembangan destinasi wisata serta peningkatan kapasitas masyarakat. Program tersebut dapat berupa pelatihan kepariwisataan, pengembangan usaha mikro, pelatihan ekonomi kreatif, pendampingan masyarakat, promosi produk lokal, hingga pengembangan desa wisata. Menurut Sinaga et al. (2021), implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata bertujuan

meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu mendukung pembangunan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program pemberdayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan masyarakat, tetapi juga membuka peluang berkembangnya berbagai potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pariwisata. Potensi tersebut meliputi sumber daya manusia, usaha mikro dan kecil (UMKM), ekonomi kreatif, partisipasi masyarakat, serta kelembagaan lokal. Identifikasi terhadap potensi-potensi tersebut penting dilakukan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Daya Tarik Wisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata dapat berupa kekayaan alam, budaya, hasil karya manusia, maupun aktivitas masyarakat yang mampu memberikan pengalaman bagi wisatawan.

Menurut Sihombing dan Siahaan (2018), pengembangan daya tarik wisata tidak hanya bergantung pada objek wisata yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, keterlibatan masyarakat, pengembangan produk lokal, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan destinasi wisata memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar tercipta destinasi wisata yang berdaya saing dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada identifikasi potensi pemberdayaan masyarakat lokal yang berkembang melalui pelaksanaan program Dinas Pariwisata, meliputi potensi sumber daya manusia, potensi UMKM, potensi ekonomi kreatif, potensi partisipasi masyarakat, dan potensi kelembagaan masyarakat sebagai faktor pendukung dalam pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake Kabupaten Tana Toraja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pemberdayaan masyarakat lokal berdasarkan pelaksanaan program Dinas Pariwisata dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake Kabupaten Tana Toraja. Penelitian dilaksanakan di kawasan Objek Wisata Buntu Burake dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tana

Toraja. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Informan terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Lurah Buntu Burake, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petugas kebersihan kawasan wisata, serta masyarakat sekitar Objek Wisata Buntu Burake.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh gambaran mengenai potensi pemberdayaan masyarakat lokal yang berkembang melalui pelaksanaan program Dinas Pariwisata dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake (Sugiyono, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja telah memberikan ruang bagi masyarakat sekitar kawasan wisata Buntu Burake untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Program-program yang dilaksanakan, seperti pelatihan kepariwisataan, pelatihan kuliner, pengembangan usaha mikro, pemasaran digital, dan pengembangan ekonomi kreatif, tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, potensi pemberdayaan masyarakat lokal dapat diidentifikasi melalui lima aspek, yaitu potensi sumber daya manusia, potensi usaha mikro dan ekonomi kreatif, potensi partisipasi masyarakat, potensi kelembagaan, serta kontribusinya terhadap pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake.

Potensi Sumber Daya Manusia

Salah satu potensi yang berkembang berdasarkan pelaksanaan program Dinas Pariwisata adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat sekitar kawasan wisata. Melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai pelayanan kepada wisatawan, pengelolaan usaha,

kebersihan lingkungan, dan pengembangan produk wisata. Meskipun belum seluruh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengikuti program memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung aktivitas kepariwisataan dibandingkan sebelumnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah menciptakan potensi sumber daya manusia yang dapat terus dikembangkan sebagai modal utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Handini et al. (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat kesiapan masyarakat dalam mendukung pengembangan destinasi wisata.

Potensi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat sekitar kawasan wisata Buntu Burake memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan wisatawan memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha kuliner, menjual minuman, cenderamata, serta produk lokal yang menjadi kebutuhan wisatawan. Beberapa masyarakat telah memanfaatkan peluang tersebut sebagai sumber pendapatan tambahan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan modal, inovasi produk, dan pemasaran.

Selain UMKM, terdapat pula potensi ekonomi kreatif yang berkembang melalui pemanfaatan budaya lokal dan produk khas Toraja. Produk kuliner tradisional, kerajinan tangan, serta berbagai hasil kreativitas masyarakat menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Lumbantobing dan Sihombing (2022) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaksanaan program Dinas Pariwisata menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya peluang usaha berbasis potensi lokal di kawasan wisata Buntu Burake.

Potensi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sekitar Buntu Burake telah menunjukkan keterlibatan dalam menjaga kebersihan kawasan wisata, memberikan pelayanan kepada wisatawan, serta mendukung berbagai kegiatan yang diselenggarakan di kawasan wisata. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa keberadaan destinasi wisata memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih belum terlibat secara aktif dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan agar lebih banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengikuti program pemberdayaan. Temuan ini sejalan dengan Sinaga et al. (2021) yang menjelaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Potensi Kelembagaan Masyarakat

Selain potensi individu, hasil penelitian menunjukkan adanya peluang penguatan kelembagaan masyarakat sebagai pendukung pengembangan destinasi wisata. Keberadaan kelompok masyarakat, pelaku UMKM, maupun organisasi yang mendukung aktivitas pariwisata dapat menjadi wadah dalam meningkatkan koordinasi, kerja sama, serta keberlanjutan program pemberdayaan. Penguatan kelembagaan penting dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada penguatan organisasi masyarakat sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan masyarakat menjadi salah satu potensi yang perlu terus dikembangkan melalui pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Potensi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Daya Tarik Wisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai potensi pemberdayaan masyarakat yang berkembang melalui pelaksanaan program Dinas Pariwisata memberikan kontribusi terhadap pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake. Peningkatan kapasitas masyarakat, berkembangnya UMKM, munculnya produk ekonomi kreatif, serta meningkatnya partisipasi masyarakat menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik bagi pengunjung. Daya tarik wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan objek wisata utama, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, kebersihan lingkungan, keramahan masyarakat, serta keberagaman produk lokal yang tersedia.

Temuan penelitian ini mendukung pendapat Sihombing dan Siahaan (2018) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam menciptakan destinasi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Selain itu, Suharto dalam Ahmad et al. (2021) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan

meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Dalam konteks Buntu Burake, pelaksanaan program Dinas Pariwisata telah menjadi stimulus bagi berkembangnya berbagai potensi masyarakat yang dapat terus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi potensi pemberdayaan masyarakat masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, belum meratanya partisipasi masyarakat, serta perlunya pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pengembangan kemitraan, serta pembinaan usaha masyarakat sehingga seluruh potensi yang dimiliki masyarakat lokal dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake Kabupaten Tana Toraja.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja telah menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai potensi pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan wisata Buntu Burake. Potensi tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kepariwisataan, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata, serta adanya peluang penguatan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata.

Identifikasi potensi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki sumber daya yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata Buntu Burake. Keberadaan masyarakat yang memiliki keterampilan, produk lokal yang beragam, serta partisipasi dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pelayanan kepada wisatawan menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing destinasi wisata. Namun demikian, optimalisasi potensi pemberdayaan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan dukungan anggaran, dan perlunya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, identifikasi potensi pemberdayaan masyarakat lokal berdasarkan pelaksanaan program Dinas Pariwisata memberikan gambaran bahwa keberhasilan pengembangan daya tarik wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan objek wisata, tetapi

juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

- a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta evaluasi program secara berkala agar seluruh potensi masyarakat lokal dapat berkembang secara optimal.
- b. Bagi masyarakat sekitar kawasan wisata Buntu Burake, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam berbagai program pemberdayaan, mengembangkan inovasi produk lokal, serta memperkuat kerja sama dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.
- c. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan kelembagaan masyarakat melalui penyediaan anggaran, fasilitasi promosi, serta kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Buntu Burake.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai model pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata berkelanjutan atau menganalisis pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan daya saing destinasi wisata.

DAFTAR REFERENSI

- Abdalla, M. (2016). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri (Studi pada RT 03 RW 02 Kelurahan Banjaran, RT 04 RW 02 Kelurahan Mojaroto dan RT 02 RW 01 Kelurahan Blabak)* [Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya].
- Ahmad, A., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 114–124. <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i1.5147>
- Andaryani, S. A., & Ambarwati, A. A. (2022). Implementasi program kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada cagar budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2108>
- Deddy, M. (2015). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Alfabeta.
- Dewi, R. K. (2016). *Studi analisis kebijakan*. CV Pustaka Setia.

- Esmeraldo, Z. M. (2014). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata dalam pengembangan desa wisata (Studi pada Desa Sumberejo, Kota Batu)* [Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya].
- Hannaji, N., Bagiastra, I. K., & Kurniansah, R. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Desa Wisata Bayan. *Journal of Responsible Tourism*, 2(1). <https://doi.org/10.47492/jrt.v2i1.1910>
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Kariamman, S., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Lubis, N., & Siahaan, A. Y. S. (2022). Implementasi pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal tenun ulos Batak di Desa Adat Ragi Hotang Meat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1032–1038.
- Lumbantobing, H. B., & Sihombing, T. (2022). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom dalam kegiatan pariwisata di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kabupaten Samosir. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 485–486.
- Maria, W. N., Ulpa, A., Kirana, N. N., & Handayani, D. N. (2023). Implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8(2), 210–224. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i2.3805>
- Muhammad, Z., & Triatmo, A. W. (2024). Pemberdayaan masyarakat di sekitar Pasar Pertapaan Indrokilo Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(1), 84–93.
- Naelana, Y., & Istiyanto, S. B. (2019). Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dalam mewujudkan “Kabupaten Tegal Open Defecation Free 2019.” *Jurnal Dakwah Tabligh*, 20(1), 106–125. <https://doi.org/10.24252/jdt.v20i1.9604>
- Pariangu, U. T. (2020). Implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Kupang. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 307–325. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3310>
- Permatasari, I. (2014). *Implementasi Program Desa Sejahtera Terpadu (PDST) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Studi di Desa Labuhan Kidul, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang)* [Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya].
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>
- Handini, S., Sukaai, S., & Kurniawan, H. K. A. (2019). *Pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan UMKM di wilayah pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. (2016). *Generasi implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Capiya Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.